

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi Jawa Barat tahun 2021 tetap terkendali meskipun berada dibawah rentang target inflasi $3\% \pm 1\%$. Realisasi inflasi Jawa Barat triwulan IV 2021 sebesar 1,69% (yoy) lebih rendah dibanding triwulan III 2021 yang mencapai 1,76% (yoy) maupun periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,18% (yoy). Pun demikian apabila dibandingkan dengan laju inflasi nasional tahun 2021 yang sebesar 1,87% (yoy), capaian inflasi Jawa Barat juga masih tercatat lebih rendah namun sama-sama berada di bawah rentang sasaran inflasi $3\% \pm 1\%$. Masih terbatasnya permintaan seiring dengan kebijakan selektif pemerintah dalam membatasi aktivitas masyarakat akibat gelombang kedua pandemi Covid-19 dan belum optimalnya daya beli masyarakat menjadi faktor utama rendahnya laju inflasi. Secara kumulatif inflasi Jawa Barat dari bulan Januari hingga Desember 2021 sebesar 1,69% (ytd), merupakan yang terendah sejak tahun 2017. Laju inflasi selama triwulan IV 2021 secara umum cukup terkendali, meskipun terdapat tekanan yang berasal dari beberapa komoditas dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sumbangan inflasi kelompok ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas minyak goreng, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan cabai rawit. Peningkatan harga komoditas minyak goreng dipengaruhi oleh penurunan pasokan minyak nabati global yang mendorong kenaikan harga CPO global di saat permintaan CPO di pasar internasional terus meningkat seiring pemulihan ekonomi dan kebijakan pemerintah negara tujuan ekspor yang menurunkan tarif bea masuk pada produk CPO. Peningkatan komoditas cabai merah dan cabai rawit dipengaruhi oleh faktor cuaca dengan intensitas cukup tinggi yang menyebabkan hasil panen berkurang dan komoditas cepat membusuk. Sementara peningkatan komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras disebabkan tingginya harga input produksi, seperti DOC Broiler yang berada diatas harga acuan dan harga pakan akibat kenaikan harga jagung dunia di saat terjadi peningkatan permintaan masyarakat menjelang dan pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional. Meskipun demikian, tekanan inflasi Jawa Barat triwulan IV 2021 cukup tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas dan tarif antara lain tomat, bawang merah, biaya administrasi transfer uang, jeruk, dan udang basah. Penurunan harga tomat, bawang merah, dan jeruk disebabkan oleh melimpahnya panen yang terjadi pada triwulan IV 2021 sementara permintaan cenderung stabil. Penurunan biaya administrasi transfer uang sejalan dengan penerapan sistem BI-FAST oleh Bank Indonesia yang memberikan dampak cukup signifikan terhadap penurunan biaya transfer khususnya transfer dana antar bank. Adapun penurunan harga komoditas udang basah juga disebabkan oleh cukup melimpahnya pasokan udang baik dari tambak maupun hasil tangkapan. Berdasarkan kelompok pengeluaran, tekanan inflasi pada sebagian besar kelompok pengeluaran barang dan jasa tahun 2021 cukup terkendali. Dari 11 kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,16% (yoy), kelompok pendidikan sebesar 2,77% (yoy), dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,67% (yoy). Peningkatan harga kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran didorong oleh peningkatan permintaan seiring momen akhir tahun (Nataru) dan peningkatan komoditas bahan baku (seperti minyak goreng, daging ayam ras, telur ayam ras, dan aneka cabai). Selanjutnya, peningkatan inflasi pada kelompok pendidikan bersumber dari peningkatan biaya pendidikan sehubungan dengan diterapkannya kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di beberapa daerah yang mengakibatkan pihak penyelenggara Pendidikan melakukan penyesuaian biaya pendidikan. Sementara peningkatan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau bersumber dari keterbatasan stok pangan akibat perubahan kondisi cuaca (tingkat curah hujan tinggi) yang menyebabkan pergeseran waktu tanam dan hasil panen, peningkatan harga komoditas

internasional, dan peningkatan permintaan meskipun masih terbatas. Berdasarkan kota pembentuk IHK di Jawa Barat, Kota Bogor tercatat mengalami inflasi tertinggi yakni 1,94% (yoy) sementara Kota Tasikmalaya merupakan yang terendah sebesar 1,17% (yoy). Sebagaimana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, faktor utama inflasi Kota Bogor disebabkan oleh peningkatan harga komoditas minyak goreng seiring dengan peningkatan harga CPO global. Selanjutnya, komoditas rokok kretek filter memberikan andil inflasi terbesar kedua di Kota Bogor sejalan dengan kebijakan peningkatan cukai tembakau. Lebih lanjut, biaya pendidikan sekolah dasar menjadi andil inflasi terbesar ketiga sejalan dengan mulai kembali normalnya kegiatan belajar-mengajar yang ditandai dengan mulai diperbolehkannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan penerapan protokol kesehatan. Dibandingkan inflasi Jawa Barat, inflasi Kota Bogor tercatat lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat ketergantungan terhadap daerah lain khususnya pasokan bahan makanan mengingat karakteristik daerah sebagai wilayah konsumen dan sebagai salah satu daerah penyangga ibukota. Di sisi lain, tingginya tingkat mobilitas masyarakat baik yang berasal dari dalam maupun luar Kota Bogor khususnya masyarakat yang berasal dari Ibukota DKI Jakarta mengingat Kota Bogor juga merupakan salah satu tujuan destinasi wisata sehingga menjadi salah satu faktor pendorong inflasi secara umum.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah, TPID Provinsi Jawa Barat memiliki program kerja strategis berdasarkan roadmap pengendalian inflasi di daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait kenaikan harga yang terjadi selama triwulan-IV 2021 yaitu: 1. Terbatasnya permintaan seiring dengan kebijakan selektif pemerintah dalam membatasi aktivitas masyarakat akibat gelombang kedua pandemi Covid-19 dan belum optimalnya daya beli masyarakat; 2. Peningkatan harga komoditas internasional seperti CPO, jagung, kedelai, dan gandum; dan 3. Anomali cuaca. 4. Adanya kenaikan harga dan kelangkaan pasokan minyak goreng di pasar serta kenaikan harga pada telur ayam ras.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga laju inflasi agar selalu berada dalam range target yang telah ditetapkan, TPID Provinsi Jawa Barat telah menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut yaitu sbb: 1. Pelaksanaan High Level Meeting TPID di beberapa daerah di Jawa Barat; 2. Peresmian program Kampung Peduli Inflasi sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga di Kota Bekasi dan Kota Sukabumi; 3. Penerbitan Surat Edaran Penguatan Informasi Harga Pangan pada Aplikasi SILINDA yang berisi himbauan kepada Kabupaten/Kota untuk berintegrasi dengan aplikasi SILINDA Jabar; 4. Capacity Building TPID se-Jawa Barat mengenai penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Periode 2022-2024; dan 5. West Java Food and Agriculture Summit Periode 2021 yang merupakan momentum untuk terus membangkitkan kinerja sektor pertanian Jawa Barat. Peran Petani Milenial sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mencapai ketahanan pangan, memperluas kesempatan kerja dan partisipasi generasi muda, serta turut berkontribusi dalam stabilitas harga pangan, tanpa menurunkan kesejahteraan para petani. Acara ini sekaligus Launching Aplikasi Pusat Komando Ketahanan Pangan (SIMAWAS PAGI) yang berkolaborasi dengan aplikasi SILINDA JABAR 6. Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah di Jawa Barat 7. Melakukan pengawasan terhadap grosir telur ayam ras di Kota Bandung dan operasi pasar murah komoditas minyak goreng di Kota Cimahi 8. Penerbitan Surat Edaran Penguatan Informasi harga pangan pada aplikasi SILINDA JABAR

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Jawa Barat secara umum berdampak dalam mengendalikan laju inflasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi kedepannya seperti: 1. Perlunya optimalisasi sinkronisasi program kerja terkait pengendalian harga antar Lembaga/instansi terkait; 2. Awareness Kepala Daerah terkait program pengendalian inflasi; 3. Pemahaman anggota TPID mengenai program kerja yang terkait pengendalian inflasi; dan 4. Minimnya dukungan pasokan data pantauan harga pangan strategis beberapa daerah di Jawa Barat.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Langkah kebijakan yang diambil oleh TPID Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian inflasi selama periode triwulan-IV 2021 diantaranya: 1. Melakukan operasi pasar murah untuk komoditas minyak goreng yang semakin langka dan mahal 2. Melakukan komunikasi aktif atas kondisi ketersediaan minyak goreng 3. Dalam implementasi surat edaran penguatan informasi harga pangan, dilakukan sosialisasi integrasi aplikasi SILINDA dengan Kabupaten/Kota yang telah memiliki aplikasi data harga pangan.